

Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan: Studi Kasus di Kota Limboto, Kabupaten Gorontalo

Sarfan Tabo¹, Sabriana Oktaviana Gintulangi²

Universitas Gorontalo

Universitas Bina Taruna Gorontalo

sarfandjtabo@gmail.com¹, sabrianna05@gmail.com²

ABSTRAK

Permasalahan sampah perkotaan menjadi salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan di daerah. Meningkatnya jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, dan pola konsumsi masyarakat menyebabkan volume sampah di Kota Limboto terus bertambah setiap tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan publik dalam pengelolaan sampah perkotaan di Kota Limboto, Kabupaten Gorontalo, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña, sedangkan kerangka analisis implementasi kebijakan mengacu pada teori George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Limboto telah berjalan cukup baik, terutama pada aspek struktur birokrasi dan komitmen pelaksana. Namun, pelaksanaan kebijakan belum optimal karena masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi adanya regulasi yang jelas, komitmen pemerintah daerah, dan dukungan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, penyediaan sarana pendukung, serta penguatan partisipasi masyarakat guna mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Publik; Implementasi Kebijakan; Pengelolaan Sampah; Sampah Perkotaan

ABSTRACT

Urban waste management has become one of the major challenges in public service delivery and sustainable regional development. The increase in population, economic

Sarfan Tabo, Cs: Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Page 88

activities, and community consumption patterns has significantly contributed to the growing volume of waste generated in Limboto City. This study aims to analyze the implementation of public policy in urban waste management in Limboto City, Gorontalo Regency, and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. The study employed a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis was conducted using the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model, while the policy implementation framework was based on George C. Edwards III's theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings reveal that the implementation of urban waste management policies in Limboto City has been relatively effective, particularly in terms of bureaucratic structure and the commitment of policy implementers. However, the policy has not been fully optimized due to several obstacles, including limited human resources, inadequate facilities and infrastructure, budget constraints, and low community participation in waste management activities. Supporting factors include clear regulatory frameworks, strong commitment from local government, and community support. Therefore, strengthening institutional capacity, improving waste management facilities, and enhancing community participation are essential to achieving an effective and sustainable urban waste management system.

Keywords: *Public Policy; Policy Implementation; Waste Management; Urban Waste*

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah perkotaan merupakan salah satu isu lingkungan yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta perkembangan aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Sampah yang tidak dikelola secara baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, maupun aspek sosial ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak lagi dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan menjadi bagian penting dari kebijakan publik yang memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi sosial.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sampah menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Pengelolaan sampah yang efektif mampu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Sebaliknya, kegagalan dalam mengelola sampah dapat menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara, meningkatkan risiko penyakit, serta menurunkan kualitas

hidup masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dituntut untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan publik yang mampu menjawab tantangan pengelolaan sampah secara komprehensif dan berkelanjutan (Kaza et al., 2018).

Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan serangkaian tindakan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurut Howlett dan Ramesh (2021), kebijakan publik merupakan keputusan strategis yang diambil pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tertentu melalui berbagai instrumen dan program yang terencana. Dalam konteks pengelolaan sampah, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan sistem pengurangan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah secara terpadu.

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah perkotaan. Pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi telah menyebabkan volume sampah terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menuntut pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengembangkan berbagai strategi dan kebijakan yang berorientasi pada prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan melalui pendekatan Reduce, Reuse, dan Recycle (3R). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga oleh efektivitas kebijakan, kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta dukungan anggaran yang memadai (Wilson et al., 2015; Ferronato & Torretta, 2019).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum pengelolaan sampah, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025. Kebijakan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di wilayah masing-masing.

Provinsi Gorontalo juga telah menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan sampah melalui berbagai kebijakan daerah. Salah satunya adalah

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yang menegaskan pentingnya pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta pengembangan teknologi dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Regulasi ini menjadi landasan bagi pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Kabupaten Gorontalo sebagai salah satu daerah berkembang di Provinsi Gorontalo juga menghadapi persoalan yang serupa. Sebagai pusat pemerintahan kabupaten, Kota Limboto mengalami peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang berdampak pada meningkatnya volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Pertumbuhan kawasan permukiman, perdagangan, jasa, dan aktivitas perkantoran menjadi faktor utama yang mempengaruhi peningkatan produksi sampah di wilayah tersebut. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan pengelolaan sampah yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kualitas lingkungan hidup.

Sebagai bentuk implementasi kebijakan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Gorontalo. Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan sampah, mulai dari asas dan tujuan, hak dan kewajiban masyarakat, penyelenggaraan pengelolaan sampah, mekanisme pengelolaan, kemitraan, peran masyarakat, hingga sanksi administratif. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga menetapkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Gorontalo dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Regulasi ini disusun sebagai tindak lanjut dari Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurangan dan penanganan sampah melalui pendekatan yang terintegrasi. Kebijakan tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menyesuaikan strategi pengelolaan sampah dengan kebijakan nasional yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan, implementasi kebijakan pengelolaan sampah khususnya di Kota Limboto masih menghadapi berbagai

kendala. Penelitian terbaru mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Limboto menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara optimal. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membuang sampah sesuai aturan, keterbatasan sarana pengangkutan sampah, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta belum tercapainya target pengurangan dan pengelolaan sampah sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas implementasi di lapangan. Menurut teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pelaksana dan masyarakat, kelancaran proses pelaksanaan, serta dampak yang dihasilkan terhadap penyelesaian masalah publik. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah menjadi penting untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan pelaksanaannya.

Selain faktor kelembagaan, partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam pengelolaan sampah perkotaan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah menjadi salah satu penyebab utama tidak optimalnya sistem pengelolaan sampah di daerah perkotaan. Perilaku masyarakat dalam membuang sampah, membayar retribusi sampah, dan mengikuti program pengelolaan berbasis 3R sangat menentukan keberhasilan kebijakan yang telah dirancang pemerintah (Amir et al., 2025).

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan (*good governance*), pengelolaan sampah memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas dalam pelaksanaan kebijakan, sedangkan masyarakat berperan sebagai pelaku utama dalam pengurangan dan pemilahan sampah. Di sisi lain, sektor swasta dapat berkontribusi melalui investasi, inovasi teknologi, dan pengembangan industri daur ulang. Sinergi antar aktor tersebut menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Di Kabupaten Gorontalo, khususnya di Kota Limboto keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih menjadi tantangan tersendiri.

Penelitian mengenai peran pemerintah dalam pengelolaan sampah di wilayah Limboto Barat menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran, sarana prasarana, sumber daya manusia, serta rendahnya kolaborasi dengan pihak eksternal menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah. Selain itu, partisipasi masyarakat juga belum merata sehingga berdampak pada efektivitas kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah.

Perkembangan konsep *smart city* dan pembangunan berkelanjutan juga mendorong perlunya inovasi dalam pengelolaan sampah perkotaan. Berbagai studi menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, sistem monitoring digital, optimalisasi rute pengangkutan sampah, serta pengembangan fasilitas daur ulang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah di kawasan perkotaan (Wouda et al., 2024).

Di sisi lain, pendekatan ekonomi sirkular (*circular economy*) juga mulai diterapkan dalam pengelolaan sampah modern. Pendekatan ini menempatkan sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali melalui proses daur ulang dan pemanfaatan ulang sehingga mampu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir. Implementasi konsep ini memerlukan dukungan kebijakan yang kuat, kesadaran masyarakat yang tinggi, serta ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Melihat berbagai tantangan tersebut, kajian mengenai kebijakan publik dalam pengelolaan sampah perkotaan di Kota Limboto menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan pemerintah daerah, mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi peningkatan kualitas pengelolaan sampah di masa mendatang.

Selain memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian kebijakan publik dan administrasi publik, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, berbasis partisipasi masyarakat, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Kebijakan publik tidak hanya berupa keputusan pemerintah, tetapi juga mencakup tindakan, program, dan strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Howlett dan Ramesh (2021), kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik melalui penggunaan berbagai instrumen kebijakan. Kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan sosial.

Dye (2017) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik mencakup seluruh tindakan maupun ketidaktindakan pemerintah yang memiliki konsekuensi terhadap masyarakat. Dalam konteks pengelolaan sampah, kebijakan publik menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan program, regulasi, dan mekanisme pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik karena pada tahap inilah kebijakan yang telah dirumuskan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Implementasi kebijakan mencerminkan proses pelaksanaan berbagai keputusan pemerintah melalui program, kegiatan, dan pelayanan publik.

Menurut Edwards III (2018), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu: 1. Komunikasi; 2. Sumber Daya; 3. Disposisi atau Sikap Pelaksana; 4. Struktur Birokrasi. Dalam konteks pengelolaan sampah perkotaan, keempat faktor tersebut sangat menentukan keberhasilan program pengurangan dan penanganan sampah. Misalnya, keterbatasan armada pengangkut sampah, kurangnya petugas kebersihan, serta rendahnya koordinasi antarinstansi dapat menghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Konsep Pengelolaan Sampah

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Menurut Kaza et al. (2018), pengelolaan sampah merupakan salah satu layanan publik yang paling penting dalam menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah yang baik dapat mengurangi risiko pencemaran lingkungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sampah modern meliputi beberapa tahapan, yaitu: 1. Pengurangan Sampah (Waste Reduction); 2. Pemilahan Sampah; 3. Pengumpulan Sampah; 4. Pengangkutan Sampah; 5. Pengolahan Sampah; 6. Pemrosesan Akhir

Kebijakan Pengelolaan Sampah di Indonesia

Pengelolaan sampah di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi nasional yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengelolaan sampah.

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Indonesia. Tujuan pengelolaan sampah menurut undang-undang ini adalah: 1. Meningkatkan kesehatan Masyarakat; 2. Menjaga kualitas lingkungan hidup; 3. Menjadikan sampah sebagai sumber daya ekonomi.

2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan target: 1. Pengurangan sampah sebesar 30%; 2. Penanganan sampah sebesar 70%; 3. Target tercapai pada tahun 2025.

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75 Tahun 2019

Peraturan ini mengatur peta jalan pengurangan sampah oleh produsen melalui pendekatan tanggung jawab produsen yang diperluas (Extended Producer Responsibility). Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia mulai menggeser paradigma pengelolaan sampah dari pendekatan kumpul-angkut-buang menuju pendekatan ekonomi sirkular dan pengurangan sampah dari sumbernya.

Pengelolaan Sampah Perkotaan

Pengelolaan sampah perkotaan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi menyebabkan volume sampah perkotaan meningkat secara signifikan setiap tahun.

Menurut World Bank (2018), kawasan perkotaan menghasilkan lebih dari 70% sampah dunia meskipun hanya dihuni oleh sekitar 55% populasi global. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah perkotaan memerlukan sistem pengelolaan sampah yang lebih kompleks dibandingkan wilayah pedesaan.

Karakteristik sampah perkotaan meliputi: 1. Volume sampah yang tinggi; 2. Variasi jenis sampah yang beragam; 3. Tingginya kandungan sampah plastik; 4. Produksi sampah harian yang terus meningkat; 5. Keterbatasan lahan untuk tempat pemrosesan akhir.

Dalam konteks Kota Limboto, peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan kawasan perdagangan menyebabkan timbunan sampah terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu mengintegrasikan aspek teknis, sosial, dan kelembagaan dalam pengelolaan sampah.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah. Menurut UN-Habitat (2020), pengelolaan sampah yang berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila masyarakat terlibat secara aktif dalam seluruh proses pengelolaan.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi: 1. Melakukan pemilahan sampah dari sumber; 2. Mengikuti program bank sampah; 3. Membayar retribusi kebersihan; 4. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai; 5. Berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong lingkungan.

Penelitian Purba et al. (2023) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat memiliki hubungan positif dengan keberhasilan program pengelolaan sampah berbasis komunitas.

Teori Good Governance dalam Pengelolaan Sampah

Good governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP, 2021), prinsip-prinsip *good governance* meliputi: 1. Partisipasi; 2. Transparansi; 3. Akuntabilitas; 4. Efektivitas dan efisiensi; 5. Responsivitas; 6. Penegakan hukum.

Dalam pengelolaan sampah, penerapan *good governance* terlihat melalui: 1. Penyusunan kebijakan yang partisipatif; 2. Keterbukaan informasi mengenai program pengelolaan sampah; 3. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran kebersihan; 4. Pelibatan sektor swasta dan masyarakat.

Penerapan prinsip *good governance* diyakini mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah perkotaan dan menciptakan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan publik dalam pengelolaan sampah perkotaan di Kota Limboto, Kabupaten Gorontalo. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang komprehensif mengenai proses pelaksanaan kebijakan, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta persepsi para pemangku kepentingan terhadap kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian.

Menurut John W. Creswell (2018), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Sementara itu, menurut Lexy J. Moleong (2021), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Penelitian deskriptif dipilih karena penelitian ini berupaya menggambarkan secara sistematis fakta, kondisi, dan fenomena yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah perkotaan di Kota Limboto tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu: 1. Kota Limboto merupakan ibu kota Kabupaten Gorontalo yang memiliki tingkat aktivitas ekonomi dan sosial yang cukup tinggi; 2. Volume sampah perkotaan terus mengalami peningkatan seiring pertumbuhan penduduk dan pembangunan wilayah; 3. Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah memiliki berbagai kebijakan terkait pengelolaan sampah, sehingga menarik untuk dianalisis implementasinya; 4. Masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan

sampah seperti keterbatasan sarana, rendahnya partisipasi masyarakat, dan pengelolaan sampah yang belum optimal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis hasil penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi: 1. Komunikasi; 2. Sumber Daya; 3. Disposisi; 4. Struktur Birokrasi

Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan karena menentukan sejauh mana informasi kebijakan dapat dipahami oleh pelaksana maupun masyarakat.

a. Sosialisasi Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo, pemerintah telah melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah melalui: 1. Pertemuan Masyarakat; 2. Media sosial pemerintah daerah; 3. Penyuluhan lingkungan; 4. Kegiatan gotong royong.

Namun demikian, sebagian masyarakat menyatakan bahwa sosialisasi belum dilakukan secara merata di seluruh wilayah Kota Limboto.

b. Kejelasan Informasi

Informasi mengenai jadwal pengangkutan sampah dan lokasi TPS telah tersedia, tetapi belum seluruh masyarakat memahami mekanisme pemilahan sampah sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Koordinasi Antarinstansi

Koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kecamatan, kelurahan, dan masyarakat telah berlangsung cukup baik. Namun, koordinasi lintas sektor masih perlu diperkuat terutama dalam pelaksanaan program pengurangan sampah.

Tabel 1. Temuan Indikator Komunika

Aspek	Temuan
Sosialisasi	Sudah dilaksanakan tetapi belum merata
Kejelasan Informasi	Cukup jelas namun belum dipahami seluruh masyarakat
Koordinasi	Berjalan cukup baik
Konsistensi Informasi	Masih perlu ditingkatkan

Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah petugas kebersihan yang tersedia dinilai masih belum sebanding dengan luas wilayah pelayanan persampahan di Kota Limboto.

Berdasarkan wawancara dengan petugas kebersihan diperoleh informasi bahwa beberapa wilayah belum dapat dilayani secara maksimal karena keterbatasan personel.

b. Anggaran

Anggaran pengelolaan sampah berasal dari APBD Kabupaten Gorontalo. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, kebutuhan pengelolaan sampah terus meningkat sehingga memerlukan dukungan anggaran yang lebih besar.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana pengelolaan sampah yang tersedia meliputi: 1. Armada truk sampah; 2. Kontainer sampah; 3. Tempat Penampungan Sementara (TPS); 4. Peralatan kebersihan.

Namun beberapa armada pengangkut sampah sudah berusia tua dan membutuhkan peremajaan.

Tabel 2. Sarana Persampahan

Jenis Sarana	Kondisi
Truk Sampah	Cukup
TPS	Cukup
Kontainer Sampah	Terbatas
Peralatan Kebersihan	Memadai

Teknologi

Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sampah masih relatif sederhana dan belum menggunakan sistem digital untuk pemantauan pelayanan persampahan.

Tabel 3. Temuan Indikator Sumber Daya

Aspek	Temuan
SDM	Masih terbatas
Anggaran	Belum sepenuhnya mencukupi
Sarana Prasarana	Cukup tetapi perlu peningkatan
Teknologi	Belum optimal

Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi menunjukkan tingkat komitmen pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yang meliputi: 1. Komitmen Pelaksana; 2. Tanggung Jawab Petugas; 3. Kesadaran Masyarakat; 4. d. Dukungan Pemangku Kepentingan.

Pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi lingkungan telah memberikan dukungan terhadap program pengelolaan sampah, meskipun kolaborasi dengan sektor swasta masih terbatas.

Tabel 4. Temuan Indikator Disposisi

Aspek	Temuan
Komitmen Aparatur	Baik
Tanggung Jawab Petugas	Baik
Kesadaran Masyarakat	Masih rendah
Dukungan Stakeholder	Cukup baik

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan, yang meliputi: 1. Pembagian Tugas; 2. Standar Operasional Prosedur (SOP); 3. Pengawasan; 4. Koordinasi Internal

Koordinasi internal antarbidang dalam Dinas Lingkungan Hidup berjalan cukup baik sehingga pelayanan persampahan tetap dapat terlaksana.

Tabel 6. Temuan Indikator Struktur Birokrasi

Aspek	Temuan
Pembagian Tugas	Jelas

Aspek	Temuan
SOP	Tersedia
Pengawasan	Berjalan
Koordinasi Internal	Baik

Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Limboto

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Limboto telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan teori Edwards III, faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

Dari aspek komunikasi, pemerintah telah melakukan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Akan tetapi, penyebaran informasi yang belum merata menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami pentingnya pengelolaan sampah berbasis 3R.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ferronato dan Torretta (2019) yang menyatakan bahwa komunikasi yang efektif menjadi faktor utama keberhasilan pengelolaan sampah di negara berkembang.

Keterbatasan Sumber Daya sebagai Hambatan Implementasi

Sumber daya menjadi faktor yang paling dominan mempengaruhi implementasi kebijakan. Keterbatasan jumlah petugas, armada pengangkut, dan anggaran menyebabkan pelayanan persampahan belum mampu menjangkau seluruh wilayah secara optimal.

Menurut Edwards III, kebijakan yang baik tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Temuan ini juga sejalan dengan studi Kaza et al. (2018) yang menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan dan pembiayaan merupakan faktor penting dalam pengelolaan sampah perkotaan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih relatif rendah. Sebagian masyarakat belum membiasakan diri melakukan pemilahan sampah maupun menjaga kebersihan lingkungan secara konsisten.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan prinsip penting dalam konsep good governance yang menekankan kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam penyelesaian masalah publik.

Upaya Strategis Peningkatan Pengelolaan Sampah

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa strategi yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Gorontalo antara lain: 1. Meningkatkan intensitas sosialisasi pengelolaan sampah berbasis 3R; 2. Menambah jumlah armada pengangkut sampah; 3. Meningkatkan kapasitas dan jumlah petugas kebersihan; 4. Mengembangkan program bank sampah di setiap kelurahan; 5. Memanfaatkan teknologi digital dalam monitoring pelayanan persampahan; 6. Meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dan organisasi Masyarakat; 7. Mengembangkan konsep ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Faktor Pendukung, meliputi: 1. Adanya regulasi yang jelas mengenai pengelolaan sampah; 2. Komitmen pemerintah daerah yang cukup tinggi; 3. Dukungan masyarakat dan tokoh lingkungan; 4. Tersedianya struktur organisasi pengelola sampah.

Faktor Penghambat, meliputi: 1. Keterbatasan anggaran; 2. Kurangnya armada; 3. pengangkut sampah; 4. Rendahnya kesadaran Masyarakat; 5. Belum optimalnya penerapan teknologi; 6. Keterbatasan jumlah petugas kebersihan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Limboto Telah Berjalan Cukup Baik, Namun Belum Optimal, oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan berbagai program pengelolaan sampah yang mengacu pada regulasi nasional maupun daerah. Program tersebut meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampah, kegiatan kebersihan lingkungan, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Komunikasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui sosialisasi, penyuluhan, dan kegiatan lingkungan hidup telah memberikan

kontribusi terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah.

Meskipun demikian, penyampaian informasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Akibatnya, masih terdapat masyarakat yang belum memahami prosedur pengelolaan sampah yang benar, jadwal pengangkutan sampah, maupun pentingnya pengurangan sampah sejak dari sumbernya.

Keterbatasan jumlah petugas kebersihan, armada pengangkut sampah, sarana dan prasarana pendukung, serta keterbatasan anggaran menyebabkan pelayanan persampahan belum dapat berjalan secara maksimal. Selain itu, penggunaan teknologi dalam sistem pengelolaan sampah masih relatif sederhana sehingga belum mampu mendukung efisiensi pelayanan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai.

Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo dan petugas kebersihan menunjukkan komitmen yang cukup tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini terlihat dari pelaksanaan kegiatan pengangkutan sampah yang dilakukan secara rutin serta upaya pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan perkotaan. Namun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh sikap masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam membuang dan memilah sampah masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang terdefinisi, keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta mekanisme koordinasi yang berjalan cukup baik menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Limboto.

Keberadaan struktur birokrasi yang tertata memungkinkan pelaksanaan program persampahan berjalan secara sistematis meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: 1. Meningkatkan alokasi anggaran pengelolaan sampah guna mendukung penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai; 2.. Menambah jumlah armada pengangkut sampah sehingga pelayanan dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Limboto secara optimal; 3. Meningkatkan

jumlah dan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas dalam pengelolaan sampah melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi; 4. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi informasi untuk mendukung efektivitas pengawasan dan pelayanan persampahan; 5. Memperluas program bank sampah dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat pada seluruh kelurahan di Kota Limboto; 6. Meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan terhadap masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi). Alfabeta.
- Anderson, J. E. (2021). *Public Policymaking: An Introduction* (9th ed.). Cengage Learning.
- Arikunto, S. (2021). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Edwards III, G. C. (2018). *The Public Policy Implementation*. JAI Press.
- Ferronato, N., & Torretta, V. (2019). Waste mismanagement in developing countries: A review of global issues. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(6), 1060. <https://doi.org/10.3390/ijerph16061060>
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2021). *Studying Public Policy: Principles and Processes*. Oxford University Press.
- Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). *What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*. World Bank Publications.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2021). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2021). *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik*. Elex Media Komputindo.
- Purba, H. D., Meidiana, C., & Adrianto, D. W. (2023). Community participation in sustainable waste management: Evidence from Indonesian urban areas. *Sustainability*, 15(4), 3154. <https://doi.org/10.3390/su15043154>

- Setyowati, R., & Mulasari, S. A. (2019). Knowledge and behavior of communities in waste management practices. *Kesmas: National Public Health Journal*, 14(2), 87–95.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta.
- United Nations Environment Programme (UNEP). (2024). *Global Waste Management Outlook 2024*. UNEP.
- United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). (2020). *Solid Waste Management in the World's Cities*. Earthscan.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2021). *Governance for Sustainable Development*. UNDP Publications.
- Velis, C. A., & Cook, E. (2021). Mismanagement of plastic waste through open burning with emphasis on the global south: A systematic review. *Environmental Science & Technology*, 55(11), 7186–7202. <https://doi.org/10.1021/acs.est.0c08536>
- Wilson, D. C., Rodic, L., Modak, P., Soos, R., Carpintero, A., Velis, C., Iyer, M., & Simonett, O. (2015). *Global Waste Management Outlook*. United Nations Environment Programme.
- Wouda, N. A., Aerts-Veenstra, M., & Van Foreest, N. (2024). Integrated urban waste collection and routing policy for sustainable city management. *Waste Management*, 183, 1–12.
- Yudhistirani, S. A., Syaufina, L., & Mulatsih, S. (2020). Design and implementation of community-based waste management in urban areas. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 10(3), 337–348.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.